

# PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMEKARAN DESA (STUDI KASUS DESA PINDI WANGGA WUNDUT, KECAMATAN LEWA, KABUPATEN SUMBA TIMUR)

Frengki Hamariu<sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2)</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email:[frengki\\_hamariu@yahoo.com](mailto:frengki_hamariu@yahoo.com)<sup>1)</sup>, [andreas.noak@yahoo.com](mailto:andreas.noak@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [ketuterawan@gmail.com](mailto:ketuterawan@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*A study of the role of local elites in the process of separating the village of Pindi Wangga Wundut, Lewa District, East Sumba Regency. research method used is descriptive qualitatives. Using the theories of Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca as references in research. Research shows that the role of local elites cannot be separated from the effects of change in the political system. The elite, which is the main driving force for the formation autonomous regions, often makes village expansion an arena of struggle and power struggles. The formation of an autonomous region can create a new power space. Therefore, the local elite of the Pindi Wangga Wundut village will try to take a position to secure power. In conclusion, this did not happen in the Pindi Wangga Wundut village, because the expansion of the village was purely the desire of the community without interference from other parties.*

**Keywords:** Expansion, Elite, Community

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tercapainya negara yang sejahtera menjadi tujuan mulia yang hendak dicapai oleh negara-negara dunia. Dengan tujuan inilah berbagai teori dan pemikiran dari para ahli tentang bagaimana konsep yang tepat dalam membangun negara mencapai kesejahteraan dirancang. Salah satu kebijakan yang menjadi pilihan adalah kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi di yakin dapat mewujudkan keadilan di bidang politik sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik di tingkat local . Densentralisasi juga dapat mewujudkan tanggungjawab pemerintah dan demokratisasi yang di dasari

pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih tahu apa yang menjadi persoalan masyarakat.

Pemekaran Desa merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat berdasarkan pada UU No.32 tahun 2004. mengenai pemerintah daerah.

Alasan daerah dimekarkan dilihat dari keluasan wilayahnya, kondisi geografis, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Syarat pemekaran desa salah satunya yakni wilayah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk maksimal 1000 jiwa/200 kk (Kepala Keluarga).. Ada beberapa desa yang dengan luas desanya tidak memenuhi syarat tersebut. menginginkan pemekaran desa sehingga

pemerataan pembangunan dapat tercapai.. Berdasarkan penelitian Prof. Johermansyah tahun 2007 menyebutkan dari semua wilayah pemekaran yang dikategorikan berhasil hanya 5% saja.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999, melihat berbagai potensi-potensi yang ada. Pemerintah bersama-sama dengan berbagai lembaga yang ada di desa mengadakan pemekaran wilayah seperti halnya Desa Pindu Wangga Wundut Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur. Desa Pindi Wangga Wundut merupakan salah satu desa pemekaran pada tahun 2015, dengan luas wilayah 11.220 Ha dan jumlah penduduk sebelum pemekaran berjumlah 1013 jiwa dengan jumlah 217 KK, sedangkan sesudah pemekaran 1094 jiwa dengan jumlah 235 KK dengan topografi wilayah yang keseluruhannya dataran rendah dan pegunungan

Dalam proses pemekaran wilayah Desa Kambata Wundut memekarkan satu desa tambahan yaitu Desa Pindi Wangga Wundut. Implementasi dari pemekaran wilayah menjadikan Desa Pindi Wangga Wundut yang pada mula hanya terdiri dari satu desa menjadi 2 desa dengan wilayah administratif dan otonomi yang berbeda. Pada dasarnya pelaksanaan pemekaran desa dilakukan tidak lain hanya untuk mencapai kepentingan tertentu dan mempercepat proses percepatan pembangunan di wilayah pedesaan yang berada di wilayah Desa Pindi Wangga.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana peran elite lokal dalam mendukung proses pemekaran Desa Pindi Wangga Wundut?

## **TUJUAN PENELITIAN**

mengetahui bagaimana peran elite lokal dalam proses pemekaran Desa Pindi Wangga Wundut.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Kerangka Konseptual**

Untuk mengkaji permasalahan yang diteliti dalam studi ini, serta untuk memudahkan peneliti ini, maka akan dijabarkan dalam beberapa kerangka konsep beserta ladsan teori yang digunakan untuk melihat kemunculan elite lokal atau pedesaan, maka digunakan pendekatan Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca karena lebih mendekati realitas.

### **Kelompok Elite dalam Ilmu Politik**

Manusia sejak lahir dibekali Hak dan Kewajiban. Adanya hal dan kewajiban yang dijalankan melahirkan perbedaan kedudukan dan status, baik secara harizontal maupun vertikal (Rivai,1981). Perbedaan harizontal menekankan pada aspek jenis kedudukan satu dengan yang lain, mewujudkan gejala deferensiasi sosial.

Menurut Hofstede (1991), stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti itu dapat dikelompokkan kedalam elite dan massa. Senada dan Hofstede, Amin (1981:1) mengemukakan lapisan tinggi ini merupakan golongan elite yang hakikatnya adalah sebagian pemegang kendali kepemimpinan.

Mossa melakukan analisis secara sistematis tentang elite, memberikan pemahaman bagi terciptanya kelompok elite sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat , entah dalam suatu bangsa baru atau yang sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua kelompok utama, yaitu elite

(yang memimpin) dan massa (yang dipimpin) (Bottomoro 1985:8) lebih lanjut Mosca menjelaskan, elite yang jumlah yang kecil menjalankan fungsi politik, memonopoli kekuasaan itu, sedangkan massa yang jumlah lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh elite (Putnam, 1976:20)

Dari beberapa pendapat diatas nampak jelas bahwa mereka yang dikategorikan elite adalah orang-orang yang ada dipuncak struktur-struktur sosial didasarkan pada kedudukan ekonominya (kekayaan), Jabatan-jabatan formal, tokoh-tokoh agama dan adat , orang berpendidikan tinggi dan lainnya sebagai sesuai denngan perkembangan yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan..

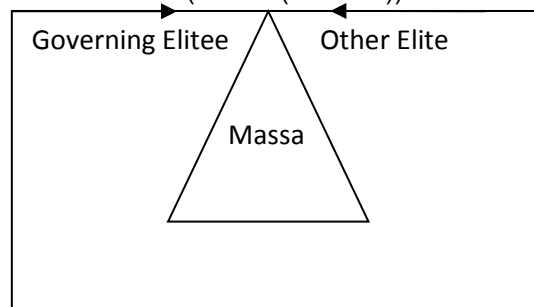
Pendekatan ini memandang kelahiran elite lebih disebabkan posisi-posisi penting dalam organisasi sosial. Mereka dikategori kelompok kunci yang memiliki wewenang dan dapat dipercaya menjaga organisasi terutama dalam kegiatan dalam merencanakan, mengelola dan mengontrol program-program yang dicanangkan. Oleh karena itu sebagian besar upaya mencapai tujuan organisasi dipertaruhkan kepada mereka.

Pandangan Pareto tentang adanya karakteristik personal dari elite, begitu juga Mosca yang sepakat adanya karakteristik personal sebagaimana dikatakan Pareto, dengan menambahkan adanya faktor-faktor struktural dan organisasional yang ikut menentukan keliharan dari kelompok selite dapat dimasukkan dalam pendekatan ini. Pandangan Sumarjan takala memberikan kata pengantar karya keller, dan pada pandangan keller sendiri dalam melihat kelahiran elite dan Michels mengatakan munculnya kelompok minoritas yang

kemudian dominan dalam mengambil keputusan adalah akibat dari struktur organisasi sosial (Usman 1990:13), dapat dimasukkan pada pendekatan kedua.

Kelompok elite yang tumbuh secara alami dalam kehidupan masyarakat ini, menurut pareto dapat dikategori menjadi dua yakni: *The Governing Elite*, yaitu individu-individu yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dan mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Kedua *Governing Elite* adalah orang-orang yang aktivitasnya berada diluar urusan pemerintah, akan tetapi mempunyai pengaruh kuat dalam formulasi kebijakan (Bottomoro 1985;9)

Model Hubungan Elite dan Massa Menurut Pareto (Usman(1990:10))



### Pendekatan elite

Ada tiga pendekatan yang lazim di gunakan untuk mengidentifikasi elite didalam ilmu sosial. Pendekatan itu meliputi: Posisional, Reputisional, dan Keputusan (Sigh, 1973:9)

Pendekatan Posisional beranggapan bahwa lembaga atau struktur pemerintah formal mempunya suatu peta hubungan kekuasaan yang bias dipakai untuk menganalisis siapa yang berkuasa diantara elite. Pendekatan ini memiliki 2 kelemahan yaitu; 1) masuknya elite-elite bomeka yang hanya mengesahkan apa yang dibuat orang lain; 2) Memungkinkan tidak masuknya pecipta

opini formil yang mempengaruhi kelompok pembuat kebijakan. Pendekat ini memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan yang sifat semu dan meremehkan pengaruh yang tidak langsung (Putnam, 1976).

Pendekatan Reputasional mendasarkan pada reputasi secara informan yang dimiliki para elite. Pendekatan ini mempergunakan informan untuk menjaring informasi siapakah diantara para elite yang mempunyai kekuasaan membuat kebijaksanaan.

Pendekatan Keputusan merupakan cara mengetahui siapakah diantara parah elite yang berkuasa dengan mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan itu. Adapun kelemahannya (Putnam:1976) yakni. 1) dalam menentukan keputusan-keputusan pa saja yang akan dianalisis siapa saja yang terlibat; 2) dalam prakteknya ada keputusan penting yang dianalisa secara terperinci.

### **Elite-Elite Lokal**

Keberadaan elite local saat ini juga sangat berpengaruh oleh faktor struktural dan organisasional (Pareto dalam Bottomoro, 1985). Keberadaan elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada berokrasi pemerintah (governing elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintah Desa (bersifat formal). Elite seperti ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapat legitimasi dari pemerintah yang lebih atas (supralokal). Samping itu dalam masyarakat juga berkembang juga kelompok elite diluar itu (Non-governing Elite), seperti bangsawan, tokoh adat, tokoh agama yang dapat legitimasi dari adat dan agama serta orang memiliki kekayaan, sehingga dianggap memiliki

kelebihan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan masyarakat.

### **Elite Lokal dalam Pembangunan**

Kelompok Elite local sangat potensial sebagai agen perubahan , terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kamauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka sebagai elite Local bukan hanya dari golongan governing elite , akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat (Ufford, 1988).

Patisipasi dalam mengambil keputusan merupakan pernyataan pikiran atau emosi kedalam setuasi kelompok yang mendominasi untuk menyumbangkan kemampuan dan ikut pertanggungjawab kelompok itu (Westra, 1980;21). Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jambatan formal dari kedudukan elite. Akan tetapi elite diluar itu memiliki keunggulan yang menjadi motivasi masyarakat dalam sebuah wilayah.

### **Interaksi antara Elite**

Proses interaksi sebagai suatu bentuk hubungan antara dua atau lebih manusia, Soekanto (1986:50) memang tidak dapat dihindari, bahwa merupakan kunci dari kehidupan social. Berkenaan dengan interaksi social, Simmel, (dalam veegeer, 1992:42), menguraikan dengan gambling, bahwa salah satu unteraksi paling nyata dan dapat diamati adalah dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan, dimana akan dilihat sebagai elite yang satu interaksi saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

### **Pemekaran Desa**

#### **Syarat-Syarat Pemekaran Desa**

Dalam Pembentukan desa baru terdapat Undang-undang No 6 tahun 2014 yang menagatur. Dilihat dari usia desa induk, jumlah penduduk, social budaya, batas wilayah desa, sumber daya alam dan sarana prasarana..

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai setuasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepemukaan (Bungin,2007:68).

### **4. PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Desa Pindi Wangga Wundut**

Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut, Desa Pindi Wangga Wundut salah satu pecahan dari desa Kambata Wundut yang terpisahkan terbentuknya Kecamatan Lewa dan kecamatan Lain yang ada di Sumba Timur, yang diresmikan pada tanggal dan nama Kecamatan Lewa mengalami perubahan dengan bertambahnya 5 desa pemekaran salah satunya Desa Pindi Wangga Wundut yang dimekar pada Tahun 2014. Desa Pemekaran Pindi Wangga Wundut dari beberapa perkampungan yakni Kampung Uma paohi, Kiku Ahu, Jara Mbara, Ladu Maling, Kambureti dan dipimpin oleh Darius Hapu Landukara sebagai kepala desa(pejabatn pemerintahan) dengan dibantu oleh Andreas Lunggi Randa Sebagai sekretaris desa.

Nama Desa Pindi Wangga Wundut diambil dari sebuah nama Kampung nene moyang yakni paraingu wunt(kampung wundut)

kampung dimana nenek moyang pertama tinggal dan menetap dan tidak berpindah-pindah atau bercocok tanam, dari situ mulai berkembangnya masyarakat Desa Pindi Wangga Wundut hingga sampai saat ini. Nama kampung pariangu wunt(kampung) cukup terkenal oleh masyarakat luas sampai saat ini, sehingga desa pemekaran dinamakan Pindi Wangga Wundut agar sejarah, tradisi dan peninggalan nenek moyang tidak dilupakan dengan perkembangan zaman saat ini. Tetapi kita lestarikan peninggalan-peninggalan nene moyang yang merupakan identitas masyarakat Pindi Wangga Wundut.

#### **Batas Wilayah Desa Pindi Wangga Wundut**

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Utara : Desa Rakawatu
- Di sebelah Timur : Desa Kondamara
- Di sebelah Selatan: Desa Kambata Wundut
- Di sebelah Barat : Kabupaten Sumba Tengah

#### **Keadaan Topografi dan Luas Wilayah**

Desa Pindi Wangga Wundut Memiliki bentuk permukaan tanah atau bentak lahan yang relatif dasar yaitu dataran tinggi dan drendah dengan ketinggian 1600 diatas permukaan laut. Luas wilayah wilayah Pindi Wangga Wundut 53,2 KM atau 5120 Ha. Tanah yang ada umumnya sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

#### **Orbitrasi**

Penjelasan mengenai detil orbitasi dan waktu tempu dari desa Pindi Wangga Wundut ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut.

No	Orbitasi	Jarak tempuh	Waktu Tempuh
1	Ke kantor Desa induk	13 Km	30 Menit
2	Ke kantor Kecamatan	15 km	35 Menit
3	Ke ibukota Kabupaten	73	3.30 Jam

### Kondisi Geografis

Secara geografis, desa Pindi Wangga Wundut terletak dibagian Utara dari pusat Ibukota, dengan jumlah penduduk yang da desa pemekaran yaitu 1013 jiwa dan 235 KK dan sudah memenuhi kuota untuk menjadi sebuah desa.

### Lambang Desa Pindi Wangga Wundut

Desa Pemekaran Pindi Wangga Wundut belum memiliki lambang desanya karena belum defenitif, ini yang menjadi alasan utama desa ini belum memiliki lambang Desanya sendiri. Sampai sekarang desa Pindi Wangga Wundut belum keluar no Registrasi Wilayah. Sehingga masih bernaung di Desa induk.

### Hasil Temuan Penelitian.

#### Ide Dasar Pemekaran wilayah Desa Pindi Wangga Wundut

Ide dasar pemekaran wilayah baru Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut bermula dari keinginan masyarakat, dan tokoh tokoh-tokoh di wilayah dusun Tana Bara untuk dapat dimekarkan, masyarakat dusun Tana Bara merasa terisolir dari wilayah-wilayah lain yang ada di Desa Kambata Wundut terlepas dari itu juga dari segi pelayanan,

pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan fasilitas umum tidak merata karena jarak desa induk kedesa mekar cukup jauh yaitu 13 km dan dibatasi oleh hutan lindung dengan desa induk. Desa Kambata Wundut merupakan desa paling besar yang ada di kecamatan lewa dengan luas 11 220 Ha, yang menjadi persoalan yang di alami oleh masyarakat desa pemekaran pindi wangga, atas dasar inilah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat diskusi bersama dan sepakat dusun Tana Bara menjadi sebuah desa.

Keinginan untuk menjadikan Desa bukan semata-mata karena untuk memenuhi persiapan untuk terwujudnya daerah otonomi, tetapi dengan ada pemekaran dapat membantu masyarakat baik dalam pelayanan, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, pambangun ekonomi, infrastruktur seperti jalan, listrik dan prasarana umum lainnya tidak dapat terelisasi dengan baik karena apa yang terjadi selama ini jauh dari harapan masyarakat banyak yang tidak sentuh dari pemerintah dan menjadi wilayah terkebelakang yang ada di Desa Kambata Wundut (Kaliang Kalukur salah satu tokoh masyarakat).

#### Faktor-faktor Masyarakat Dusun Tana Bara ingin menjadi sebuah Desa

*pertama* belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada Dusun Tana Bara. *Kedua*, jarak antara Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut ke Desa Kambata Wundut (Desa Induk) dengan jarak 13 km. *Ketiga*, kurangnya perhatian pemerintah desa induk, Sehingga pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik hal inilah yang menjadi dasar masyarakat ingin menjadi daerah otonomi baru.

## **Potensi Sumber Daya Alam (SDA)**

Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut mulai adanya perubahan. Adapun potensi Sumber Daya Alam Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut.

### **a. Perkebunan dan Pertanian**

Lahan perkebunan di Desa pemekaran Pindi Wangga Wundut dengan luas 4720 Ha, sebagian besar lahannya tidak dikelola karena merupakan padang, pegunungan dan hutan lindung dan digunakan menjadi tempat berternak masyarakat. Sedang lahan pertanian masyarakat mengelola 287 Ha yang menjadi penghasilan masyarakat.

## **Hambatan dalam pembentukan Desa Pindi Wangga Wundut**

Dalam pembentukan Desa Pindi Wangga Wundut tidak ada hambatan karena ini murni keinginan masyarakat untuk memperjuangkan pemekaran, bukan dipolitisasi oleh elite politik mau elite lokal dalam mencari pentingan seperti popilaris ataupun posisi dalam desa pemeka, yang menjadi keinginan masyarakat menjadi daerah yang maju dan dapat mempercepat pembangunan.

## **Pertimbangan Dalam Membentuk Desa Pindi Wangga Wundut**

Ada beberapa pertimbangan dalam membentuk Desa Pindi Wangga Wundut.

### **a. Faktor peran elite local**

Peran elite local tentu sangat berpengaruh penting dalam pemekaran desa, Dimana elite-elite mempunyai kemampuan, keahlian sehingga masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap elite-elite local dan tokoh-tokoh dalam memperjuangkan pemekaran.

### **b. Faktor aspirasi rakyat**

Aspirasi rakyat Desa Pindi Wangga Wundut dimana harapan masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada didesa pemekaran dapat didengar oleh pemerintah mengenai persoalan masyarakat.

## **Peran Elite lokal Dalam Proses Pemekaran Desa Pindi Wangga Wundut**

Keberadaan elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada berokrasi pemerintah (governing elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintah Desa (bersifat formal). Elite semacam ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena karena mendapatkan legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas (supralokal). Disamping ini dalam masyarakat berkembang juga kelompok elite diluar itu (Nongoverning elite), seperti para bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama yang mendapatkan legitimasi dari adat dan agama uang dimiliki serta kekayaannya, sehingga dianggap memiliki kelebihan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan bagi masyarakat dan miliki posisi tunggal dalam masyarakat.

## **Langkah-langkah yang Dilakukan dalam Mewujudkan Desa Pemekaran Pindi Wangga Wundut**

1. Persetujuan Dari Desa Kambata Wundut (Desa Induk). Dari hasil Wawancara dengan Kepada Desa Piet Langu Hiama yang menjabat sebagai kepala Desa Kambata Wundut menyetujui pemekaran Desi Pindi Wangga Wundut menjadi sebuah desa dilihat dari luasnya wilayah desa induk cukup besar dan pemeretaannya tidak dapat berjalan

dengan baik karena jarak ke Desa induk yang cukup jauh ini merupakan salah problem yang dialami masyarakat pemekaran selama ini, dengan adanya pemekaran dapat membantu masyarakat dalam membangun wilayah.

2. Persetujuan DPRD Kabupaten Sumba Timur. Prasyarat ini yang menjadi problem masyarakat dari tahun 2002, 2008 sampai 2012 belum mendapatkan persetujuan pemerintah tetapi masyarakat tidak pernah menyerah untuk memperjuang ketidakadilan yang mereka alami dan tahun 2014 mendapatkan respon dari pemerintah untuk dimekar.

3.Rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Propinsi NTT.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemekaran Desa Wangga Wundut tidak terlepas dari keinginan masyarakat dan tokoh-tokoh dalam mewujudkan pemekaran desa, tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau pihak-pihak lain. Tetapi murni keinginan masyarakat menjadi daerah otonomi baru.

2.Dalam rangka mempermudah terlaksana pemekaran Pemekaran Desa Pindi Wangga Wundut, terdapat tiga lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pemekaran. Pertama, Persetujuan Desa Kambata Wundut merupakan Desa Induk. Kedua, Persetujuan DPRD Kabupaten dan Bupati Sumba Timur. Ketiga, persetujuan DPRD Propinsi dan Gubernur, Maka Desa Pindi Wangga Wundut dapat Dimekarkan pada Tahun 2014.

### Saran

Dengan adanya pemekaran dapat dipergunakan dengan dengan baik untuk membangun dan mengelola Sumbar Daya

Alam (SDA) dan pemerataan palayanan dapat berjalan dengan baik .sehingga bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin dapat tersalur dengan baik dan tepat sasaran.

Pemerintah Desa Pemekaran Pindi Wangga Wundut dapat membangun infrastruktur, jalan, listrik, Polindes dan fasilitas-fasilitas umum lain sehingga dapat membantu masyarakat masyarakat untuk dapat bersaing dengan dunia luar, Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai pemerintah desa dapat bersama-sama dengan masyarakat mengelola sumber daya sehingga kemiskinan dapat diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Djoko Harmantyo, *Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2007. Jurnal, Makara, Sains, vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22. Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
- Debby Rahmi Isnaeni, *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat*, 2012. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB. .
- Ardianto, Elvinaro. 2017. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung :Simbosa Rekatama Media.
- Bottomoro, T. B. 1985. *Elites and Heterogenity, A Primitive Theory Social Structure*. New York: The Free Press, A devision of Mc.Millan Publishing Co, Ine.
- Cahyono, Heru (ed), 2005, *Konflik Politik Pedesaan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Masyur, Amin (ed).1988. *Kelompok Elit Politik Pedesaan*. Jakarta: YIIS, Pustaka Grafika Kita.



- Putman, Robert, D. 1976. *The Comparative Study Of Political Elites*. Eanglewood Cleffts, N. J: Prentice Hall.
- Khairudin, SS. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yogyakarta : Penerbit Liberti Yogyakarta.
- .Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa
- Sandy, I Made. 1977. *Penggunaan Tanah ( Land USE ) di Indonesia Publikasi No 75*. Jakarta : Direktorat tata Guna Tanah Dirjen Agraria Departemen dalam .
- Sihono. 2003. "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Prasa`1rana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojongso Surakarta*". Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. Semarang
- Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*,penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari, 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*, Penerbit Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.